

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Program pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 54,2 juta (40,1%) pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta (11,3%) pada tahun 1996. Namun, berbagai hal yang terjadi di Indonesia membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, seperti: krisis ekonomi yang terjadi sejak Juli 1997, bencana alam gempa bumi, dan tsunami yang terjadi di Aceh dan Sumatra Utara pada akhir Desember 2004. Menurut perhitungan BPS (Biro Pusat Statistik) jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) pada tahun 1998.

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Melihat kondisi negara Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya. Penulis berharap dengan karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengentaskan kemiskinan dari Negara tercinta ini.

Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.

Berbagai upaya tersebut telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 54,2 juta (40.1%) pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta (11.3%) pada tahun 1996. Namun, dengan terjadinya krisis ekonomi sejak Juli 1997 dan berbagai bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami pada Desember 2004 membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu melemahnya kegiatan ekonomi, memburuknya pelayanan kesehatan dan pendidikan, memburuknya kondisi sarana umum sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin menjadi 47,9 juta (23.4%) pada tahun 1999. Kemudian pada 5 tahun terakhir terlihat penurunan tingkat kemiskinan secara terus menerus dan perlahan-lahan sampai mencapai 36,1 juta (16,7%) di tahun 2004 seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini (catatan: terjadi revisi metode di tahun 1996).

Penduduk Indonesia kurang lebih 80% tinggal di daerah pedesaan yang bekerja pada sektor pertanian sebagai mata pencarian pokoknya. Sektor ini menyediakan pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertanian di Indonesia ini juga. Ini berarti bahwa tanah dikuasi oleh kelompok-kelompok yang menduduki daerah-daerah tertentu yang bersangkutan. Akan tetapi ada banyak suku bangsa yang melakukan bercocok tanam seperti itu

juga akan terlihat adanya gejala-gejala yang menyebabkan hak milik individu. Hal ini berkembang karena sering kali seorang individu telah selesai mengerjakan dari hasil memetik bumi dari tanah desanya, tidak meninggalkan tanah itu. Ia tetap memelihara hubungannya dengan tanah tadi dengan cara misalnya menanam pohon-pohonan dari tumbuh-tumbuhan yang berumur panjang. Misalnya kelapa, karet, kopi, kemiri dan beberapa tanaman yang di kemudian hari bernilai ekonomis seperti pala dari cengkeh.<sup>1</sup>

Perkembangan hak milik individu biasanya juga bersamaan dengan proses bertambah padatnya penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka berbagai krisis akan muncul dalam masyarakat. Orang bisa juga mendapat tanah pekulen, tanah yasan, maupun tanah bengkok artinya orang menggarap tanah kepunyaan orang lain, dan hasil dibagi antara si empunya dan si penggarap tanah. Besarnya bagian-bagian tentu tergantung kepada berbagai faktor kualitas tanah, penawaran tenaga penggarap atau buruh tani yang ada, dan juga pada macam tanaman yang dikerjakan. Pada tanah dengan kualitas yang baik si empunya tanah mendapat bagian yang besar, demikian pula kalau penawaran tenaga penggarap tanah besar, sebaliknya kalau penawaran tenaga penggarap tanah itu kecil maka orang yang akan mengerjakan tentu akan lebih mahal dan merekalah yang minta bagian yang besar. Tergantung kepada faktor-faktor itu, diberbagai tempat ada kebiasaan pembagian untuk setiap pihak sebesar setengah yang disebut *maro*: seringkali pula si empunya tanah bisa mendapat bagian yang lebih besar, sebanyak  $\frac{2}{3}$  yang disebut *mertelu*. Kadang kalasi yang punya tanah bisa mendapat bagian yang

---

<sup>1</sup> Sukidin, Sosiologi Ekonomi, (Jember:Pesona Surya Milenia.2009).hlm 34

kurang, sebesar 1/5, misalnya untuk tanaman kacang di desa-desa di Jawa Tengah bagian utara.

Pada umumnya masyarakat Kabupaten Cianjur bermata pencaharian sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dalam mempertahankan hidup. Seperti halnya yang terdapat di Desa Padaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur yang merupakan salah satu wilayah penyumbang hasil pertanian terbesar di Cianjur. Dimana masyarakatnya masih banyak yang menyandarkan hidupnya dengan bergantung kepada sektor pertanian, sehingga mayoritas masyarakatnya merupakan buruh tani.

Para buruh tani hanya mengandalkan perintah dari petani yang mempunyai lahan, bahkan buruh tani sering sekali dipekerjakan dalam sistem kerja harian. Buruh tani yang bekerja pada seorang petani, kemudian setelah buruh tani tersebut selesai bekerja, maka pada hari itu juga dibayar upahnya.<sup>2</sup> Pada hari berikutnya buruh tani tersebut dapat bekerja di petani lainnya, itupun jika ada petani yang menawarkan pekerjaan pada lahannya. Secara umum nilai nominal tingkat upah buruh tani dari tahun ke tahun terus meningkat. Tetapi nilai riilnya jika dikonversikan ke harga beras yang berlaku tidak banyak mengalami perubahan yang mencolok yaitu hanya berkisar antara 2,5- 3,0 kg beras kualitas sedang dengan waktu kerja perhari sekitar 6 jam. Upah buruh tani wanita besarnya sekitar 0,7- 0,8 dari upah laki-laki.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Abdul Rojak, Pengantar Ilmu Pertanian, (Bandung : Pustaka Giratuma : 2004). hlm 43

<sup>3</sup> Ibid., h. 45

Meskipun petani menerima, katakanlah 1 bau, yang dapat memecahkan masalah hidup mereka, tidak lantas mereka terus bertahan. Jika anak dari keluarga tidak memiliki pekerjaan lain dan para buruh tani tidak dapat menambah lebih banyak peluang kerjanya, tentunya dengan bersaing dengan buruh-buruh tanilainnya. Karena terbukti jumlah buruh tani lebih besar daripada jumlah petani yang mempunyai lahan.

Fenomena kemiskinan pedesaan merupakan tantangan yang sangat serius saat ini. Di sadari atau tidak, setiap saat kesenjangan antara golongan kaya dan miskin di pedesaan semakin melebar. Tetapi tingkat pengetahuan kita dewasa ini mengenai keanekaragaman wajah kemiskinan di Indonesia masih sangat terbatas. Pengetahuan tentang keadaan golongan miskin, proses pemelaran serta dinamikanya masih kurang memadai. Penelitian ini secara khusus memfokuskan permasalahan pada kehidupan buruh tani dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, berkaitan dengan posisi buruh tani dalam struktur sosial masyarakat desa. Sebagai kelompok masyarakat dengan upah minim, buruh tani adalah kelompok masyarakat yang menduduki posisi terbawah- baik dari segi status sosial maupun tingkat pendapatan dalam stuktur sosial masyarakat desa. Kedua, untuk kepentingan studi penelitian ini yang mencoba melihat lebih jauh pengaruh situasi sosial budaya masyarakat terhadap tingkat kerentanan buruh tani. Setidaknya, dengan memilih obyek penelitian lapisan masyarakat miskin yang disinyalir berada dalam posisi terbawah di sektor pertanian, maka diharapkan dapat memberikan gambaran yang memuaskan mengenai cara-cara kreatif dan keunggulan buruh tani sebagai masyarakat miskin dalam menyiasati kesengsaraan

dan kerentanannya. Dengan demikian, maka peneliti akan meneliti mengenai Nilai Sosial Budaya dan Mekanisme Bertahan Hidup Keluarga Buruh Tani di Desa Padaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur. Mengenai tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai sosial budaya yang ada dalam kehidupan buruh tani, persepsi mereka tentang kemiskinan itu sendiri dan upaya yang dilakukan untuk bertahan hidup.

Padahal, kalau bicara soal kesejahteraan, nasib buruh tani lebih layak untuk disuarakan dan diperjuangkan. Mereka dan keluarganya merupakan salah satu fraksi terbesar penduduk miskin negeri ini, selain petani gurem.

Tak bisa dimungkiri, hingga kini kemiskinan tetap merupakan fenomena sektor pertanian. Pasalnya, sebagian besar penduduk miskin negeri ini tinggal di desa dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian, umumnya, sebagai petani atau buruh tani.

Statistik kemiskinan resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari lalu menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta orang atau mencakup 10,96 persen dari jumlah total penduduk Indonesia pada September 2014. Mayoritas dari jumlah total penduduk miskin tersebut tinggal di desa dengan persentase mencapai 62,6 persen.<sup>4</sup>

Namun apa daya, para buruh tani adalah kaum marginal di negeri ini. Mereka hanyalah kumpulan orang-orang paling tinggi tamatan sekolah dasar yang tidak memiliki kemewahan untuk berserikat, berorganisasi, atau apapun namanya untuk menuntut perbaikan kesejahteraan di ruang publik.

---

<sup>4</sup> Jonathan Houghton, Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Salemba Empat : 2012) hlm 58

Sebagai pekerja di sektor informal, mereka juga tak punya posisi tawar yang cukup kuat untuk menuntut kenaikan upah. Tak seperti pekerja di sektor formal (karyawan), mereka tak mengenal istilah upah minimum regional (UMR). Jadi, tak usah heran bila upah mereka lebih rendah bila dibandingkan dengan upah pekerja kasar lainnya. Misalnya, upah buruh bangunan.

Data BPS memperlihatkan, upah harian buruh tani sepanjang tahun 2014 rata-rata hanya sebesar Rp45 ribu. Upah nominal sebesar itu tentu jauh dari cukup untuk menyelamatkan buruh tani dan keluarganya dari jerat kemiskinan.

Sedihnya, bagi buruh tani, hidup kian pelik karena daya beli mereka terus merosot meski pada saat yang sama upah yang mereka terima mengalami kenaikan. Musababnya, kenaikan upah nominal tersebut yang tak seberapa jumlahnya tak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup akibat harga-harga kebutuhan pokok yang terus melambung.

Jika pemerintah peduli terhadap kesejahteraan buruh tani, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah memberi mereka lahan garapan. Tanpa lahan pertanian, mereka yang umumnya memiliki tingkat kapabilitas yang rendah dan minim keahlian serta amat bergantung pada ekonomi usaha tani, bakal sulit keluar dari kubangan kemiskinan.

Dengan berbekal hanya medistribusikan tanah saja, penderitaan di dalam kehidupan pedesaan tidak dapat berakhir dan petani tidak dapat bertahan hidup. Kecuali ada kepastian kerja untuk setiap individu dari keluarga petani miskin di desa. Menyediakan lapangan kerja adalah masalah dasar yang dihadapi kehidupan pedesaan hari ini. Jadi, tidak diragukan lagi, distribusi tanah secara merata

merupakan masalah penting dari gerakan petani tapi bukan masalah yang pokok. Dan isu penting dari gerakan petani adalah bagaimana mengembangkan ekonomi pedesaan melalui mekanisasi dan modernisasi pertanian serta berdampingan membuka jalan menuju industrialisasi dalam rangka memberikan pekerjaan kepada setiap insan di pedesaan.

Dalam situasi ini, kebutuhan negara terbelakang seperti kita adalah untuk melakukan industrialisasi dengan inisiatif yang selalu baru sehingga dapat menyerap tenaga pengangguran. Sekarang, industrialisasi kita berjalan dengan motifnya mendapatkan keuntungan maksimum atas dasar hubungan produksi kapitalis, dan berdiri sebagai hambatan utama kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, selama sistem ini tidak dihapus, kita tidak dapat menyelesaikan tugas revolusi agraria -- yang berarti memodernisasi pertanian dan menyediakan lapangan kerja untuk penduduk pedesaan secara menyeluruh. Untuk menyelesaikan masalah dasar dari kehidupan pedesaan dan mewujudkan pembangunan industri secara sosialis, kita perlu mengakhiri sistem ekonomi saat ini, yakni sistem kapitalis. Kekuasaan buruh dan tani harus didirikan dan mengganti sistem kapitalis dengan sistem sosialisme.

Tetapi di antara gerakan kiri Indonesia, ada yang mengatakan bahwa perjuangan utama di Indonesia hari ini adalah menentang kapital monopoli dan feodalisme. Mari kita menelisik lebih jauh apa yang dimaksud anti kapital monopoli dan feodalisme dalam perjuangannya di negara kapitalis Indonesia sekarang.



Kapitalisme secara keseluruhan hidup dari eksploitasi rakyat pekerja. Gerakan kiri di Indonesia yang menentang kapital monopoli dan feodalisme menempatkan tanggung jawab eksploitasi kelas kapitalis secara keseluruhan ini pada segelintir kapitalis monopoli. Alih-alih berdiri mengambil sikap menggulingkan negara kapitalis secara keseluruhan, mereka menyembunyikan karakter dari eksploitasi kapitalis itu sendiri. Kapitalisme monopoli hanyalah bentuk dari kapitalisme itu sendiri. Ia adalah tahapan tertinggi dari perkembangan kapitalisme. Jika mereka-mereka ini tidak memiliki program revolusi sosialis, maka semua tugas mereka memerangi kapital monopoli adalah slogan kosong. Mereka mencoba melindungi kelas borjuis secara keseluruhan dari rakyat pekerja dengan menggeser tanggungjawab dari semua kelakuan buruk dari borjuasi secara keseluruhan ke pundak beberapa kapitalis monopoli.

Sedikit refleksi juga mengungkapkan bahwa slogan dari pihak anti feodalisme tidak lebih dari sebuah slogan kosong. Apapun bentuk kapitalisme di negara kita, bagaimanapun keterbelakangannya, kapitalisme adalah fitur utama dan eksploitasi kapitalis dilakukan baik di dalam pertanian maupun industri. Sekarang marilah kita melihat lebih jauh sifat-sifat ekonomi pertanian di negara kita. Dari pembahasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa hampir lebih dari separuh dari penduduk pedesaan telah berkurang ke tingkat petani tak bertanah dan buruh tani. Secara bertahap mereka kehilangan lahannya, sementara sebagian besar tanah di negara ini telah terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Di sisi lain sebagian besar masyarakat pedesaan bergeser ke tingkat proletariat pedesaan. Ini adalah hukum yang tidak terelakkan dari perkonomian kapitalis.

Kita tahu bahwa negara kita menjalankan ekonomi kapitalis yang menjadi akar dari eksploitasi. Entah di perkotaan ataupun di pedesaan, produksi dilakukan atas dasar hubungan produksi kapitalis, yakni di satu pihak adalah pemilik modal (atau pemilik alat produksi) dan di lain pihak adalah buruh yang bekerja untuk upah. Dalam kata lain, kerja-upahan. Di pedesaan, kita juga melihat hubungan kerja-upahan antara buruh tani dan pemilik lahan, baik itu lahan perorangan maupun lahan agrobisnis.

Oleh karena itu, semua ini terkonsentrasinya sebagian besar tanah di tangan segelintir orang, penurunan sebagian besar orang desa ke tingkat proletar, transformasi negeri ini ke dalam alat investasi modal, produksi pertanian terjadi atas dasar kerja-upahan dan transformasi hasil pertanian menjadi komoditas pasar nasional dan dunia – menunjukkan bahwa ekonomi pertanian Indonesia adalah ekonomi yang sepenuhnya kapitalis. Namun, kapitalisme Indonesia mundur dan terbelakang. Kaum kapitalis Indonesia tidak mandiri dan tidak progresif. Elit penguasa mabuk kebiasaan feodal. Namun, ada yang menyangkal bahwa ekonomi pertanian negara kita adalah ekonomi kapitalis. Mereka yang mengucapkan itu kurang mengerti bahwa kapitalisme membuat terobosan terhadap ekonomi pertanian di negara terbelakang.

Pada abad ke-18, ketika kapitalisme progresif, revolusi dunia berada pada tahap revolusi borjuis (kapitalis). Kapitalisme membuat langkah melalui perjuangan tanpa kompromi melawan feodalisme. Transformasi revolusioner produksi dan industrialisasi dalam skala luas berlangsung atas dasar hubungan kapitalis. Kapitalisme membuat terobosan ke pertanian dengan mekanisasi untuk

pasokan bahan baku, untuk memenuhi kebutuhan industrialisasi dan menciptakan kerja surplus dari mayoritas rakyat desa untuk diserap ke dalam industri. Tetapi di era sekarang, ketika kapitalisme secara intensif menghadapi krisis, banyak industri yang terpaksa tutup karena kalah bersaing. Ini menyebabkan kembalinya momok pengangguran. Kapitalisme dan mesin negaranya tidak dapat menyelamatkan situasi ini. Itulah sebabnya, di bawah sistem kapitalisme, modernisasi sistem pertanian besar-besaran tidak dapat terwujud. Ini yang dinamakan “konspirasi” kapitalis yang memaksa jutaan orang pedesaan dalam keadaan kelaparan.

Kapitalisme di negara kita dibesarkan di atas kompromi dengan feodalisme. Karena itu, kita menjadi negara terbelakang, mabuk feodal dalam kebiasaan dan praktek yang masih bertahan sebagai pencampuran hubungan dasar kapitalis dan eksploitasi dalam proses produksi pertanian. Sama seperti kotoran bercampur emas. Dalam situasi ini, orang yang menganjurkan memukul sisa-sisa feodal, adalah mereka yang memohon untuk eksploitasi kapitalis, tidak peduli mereka menggunakan retorika melawan borjuasi. Kita harus memahami masalah ini dengan jelas. Kita harus menyadari bahwa, musuh utama dari perjuangan revolusioner kaum buruh, petani dan elemen tertindas lainnya adalah kaum borjuis.

Dari setiap sudut kita menemukan bahwa dari tiga masalah dalam kehidupan petani, salah satunya adalah penyediaan lapangan pekerjaan bagi kelebihan penduduk yang jumlahnya bertambah setiap hari. Masalah lain juga menyangkut memodernisasi dan mekanisasi pertanian. Dan solusi atas kedua masalah dasar ini tak terpisahkan dan terkait erat dengan revolusi industri yang membuka pintu untuk pengembangan industri tanpa hambatan. Dan kemajuan

industri tanpa hambatan hanya dapat dicapai ketika kita dapat terbebas dari hubungan produksi kapitalis, menggulingkan sistem kapitalisme dan negaranya dengan kekuatan revolusi sosialis.

Jadi, demi kemajuan untuk mengakhiri penderitaan buruh tani dan petani miskin, serta menghilangkan kegelapan dari kehidupan pedesaan, modernisasi dan mekanisasi pertanian adalah kebutuhan. Tetapi dalam situasi saat ini, hal ini tidak dapat dicapai di bawah sistem kapitalisme. Jika dicoba, bagian yang sangat luas dari buruh tani dan tani miskin akan terlempar menganggur dalam sekali pukul. Oleh sebab itu, demi kelangsungan hidup dan kepentingan buruh tani, petani tak bertanah, petani miskin, semua harus bersatu tanpa ditunda lagi dan bergabung dengan proletariat industri untuk terlibat dalam menyelesaikan tugas revolusi sosialis. Mereka harus mempersiapkan diri untuk menggantikan kapitalisme, karena dengan menggulingkannya akan menjamin kemajuan industri tanpa hambatan. Modernisasi dan mekanisasi pertanian akan dimungkinkan, yang lalu akan menyelesaikan masalah kemiskinan dan kelangkaan pekerjaan di pedesaan.

Program pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 54,2 juta (40,1%) pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta (11,3%) pada tahun 1996. Namun, berbagai hal yang terjadi di Indonesia membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, seperti: krisis ekonomi yang terjadi sejak Juli 1997, bencana alam gempa bumi, dan tsunami yang terjadi di Aceh dan Sumatra Utara pada akhir Desember 2004. Menurut perhitungan BPS (Biro Pusat Statistik) jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) pada tahun 1998.

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Melihat kondisi negara Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya. Penulis berharap dengan karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengentaskan kemiskinan dari Negara tercinta ini.

Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.

Berbagai upaya tersebut telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 54,2 juta (40.1%) pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta (11.3%) pada tahun 1996. Namun, dengan terjadinya krisis ekonomi sejak Juli 1997 dan berbagai bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami pada Desember 2004 membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu melemahnya kegiatan ekonomi, memburuknya pelayanan kesehatan dan pendidikan, memburuknya kondisi sarana umum sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin menjadi 47,9 juta (23.4%) pada tahun 1999. Kemudian

pada 5 tahun terakhir terlihat penurunan tingkat kemiskinan secara terus menerus dan perlahan-lahan sampai mencapai 36,1 juta (16.7%) di tahun 2004 seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini (catatan: terjadi revisi metode di tahun 1996).

Penduduk Indonesia kurang lebih 80% tinggal di daerah pedesaan yang bekerja pada sektor pertanian sebagai mata pencarian pokoknya. Sektor ini menyediakan pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertanian di Indonesia ini juga. Ini berarti bahwa tanah dikuasi oleh kelompok-kelompok yang menduduki daerah-daerah tertentu yang bersangkutan. Akan tetapi ada banyak suku bangsa yang melakukan bercocok tanam seperti itu juga akan terlihat adanya gejala-gejala yang menyebabkan hak milik individu. Hal ini berkembang karena sering kali seorang individu telah selesai mengerjakan dari hasil memetik bumi dari tanah desanya, tidak meninggalkan tanah itu. Ia tetap memelihara hubungannya dengan tanah tadi dengan cara misalnya menanam pohon-pohonan dari tumbuh-tumbuhan yang berumur panjang. Misalnya kelapa, karet, kopi, kemiri dan beberapa tanaman yang di kemudian hari bernilai ekonomis seperti pala dan cengkeh.<sup>5</sup>

Perkembangan hak milik individu biasanya juga bersamaan dengan proses bertambah padatnya penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka berbagai krisis akan muncul dalam masyarakat. Orang bisa juga mendapat tanah pekulen, tanah yasan, maupun tanah bengkok artinya orang menggarap tanah kepunyaan orang lain, dan hasil dibagi antara si empunya dan si penggarap tanah. Besarnya bagian-bagian tentu tergantung kepada berbagai faktor kualitas tanah, penawaran tenaga penggarap atau buruh tani yang ada, dan juga pada macam tanaman yang

---

<sup>5</sup>Sukidin, Sosiologi Ekonomi, (Jember:Pesona Surya Milenia.2009).hlm 34

dikerjakan. Pada tanah dengan kualitas yang baik si empunya tanah mendapat bagian yang besar, demikian pula kalau penawaran tenaga penggarap tanah besar, sebaliknya kalau penawaran tenaga penggarap tanah it kecil maka orang yang akan mengerjakan tentu akan lebih mahal dan merekalah yang minta bagian yang besar. Tergantung kepada faktor-faktor itu, diberbagai tempat ada kebiasaan pembagian untuk setiap pihak sebesar setengah yang disebut *maro*: seringkali pula si empunya tanah bisa mendapat bagian yang lebih besar, sebanyak  $\frac{2}{3}$  yang disebut *mertelu*. Kadang kalasi yang punya tanah bisa mendapat bagian yang kurang, sebesar  $\frac{1}{5}$ , misalnya untuk tanaman kacang di desa-desa di jawa tengah bagian utara.

Pada umumnya masyarakat Kabupaten Cianjur bermata pencaharian sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dalam mempertahankan hidup. Seperti halnya yang terdapat di Desa Padaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur yang merupakan salah satu wilayah penyumbang hasil pertanian terbesar di Cianjur. Dimana masyarakatnya masih banyak yang menyandarkan hidupnya dengan bergantung kepada sektor pertanian, sehingga mayoritas masyarakatnya merupakan buruh tani.

Dengan luas Desa Padaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur 1.822 Hektar, dan suhu udara rata-rata 25-30 Derajat Celcius, para warga memanfaatkan lahan mereka untuk bercocok tanam, khususnya Padi. Ada yang mempunyai lahan atau sawah sendiri, namun adapula yang hanya bekerja sebagai buruh tani. Walaupun nyatanya, yang menjadi buruh tani lebih besar daripada yang mempunyai lahan. Terbukti pada mata pencaharian, jumlah buruh tani 1.218 orang sedangkan petani si pemilik lahan 516 orang.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Penduduk Indonesia kurang lebih 80% tinggal di daerah pedesaan yang bekerja pada sektor ini menyediakan pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada umumnya masyarakat Kabupaten Cianjur bermata pencaharian sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dalam mempertahankan hidup. Seperti halnya yang terdapat di Desa Padaluyu kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur. Dimana masyarakatnya masih banyak yang menyandarkan hidupnya dengan bergantung kepada sektor pertanian, sehingga mayoritas masyarakatnya merupakan buruh tani.

## 1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku buruh tani di Desa Padaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur ?
2. Bagaimana penyebab kemiskinan pada buruh tani di Desa Padaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur ?
3. Bagaimana respon buruh tani terhadap upaya pemerintah di Desa Padaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur ?



#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku buruh tani di Desa Padaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui penyebab kemiskinan pada buruh tani di Desa Padaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui respon buruh tani terhadap di Desa Padaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah cakrawala dan khazanah ilmu pengetahuan khususnya jurusan Sosiologi, dan umumnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menarik minat penelitian lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjut tentang masalah yang sama atau yang serupa. Dari hasil penelitian itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif, dan akan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang sosial kemasyarakatan pada umumnya.

## 1.6. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos,2002).

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Menurut Soerjono Soekanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Frank Ellis kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Orang disebut miskin jika dalam kadar tertentu sumber daya ekonomi yang mereka miliki di bawah target atau patokan yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan kemiskinan sosial adalah kurangnya jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung orang untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitasnya meningkat. Dapat juga dikatakan bahwa kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia.

Kelas sosial dapat didefinisikan sebagai suatu strata (lapisan) orang-orang yang berkedudukan sama dalam kontinum (rangkaiannya kesatuan) status sosial. Kedudukan sosial seorang pembersih kantor tidaklah samaudukannya dengan kedudukan seorang pimpinan seorang perguruan tinggi. Kelas sosial merupakan suatu realitas sosial yang penting, bukan sekedar suatu konsep teoretis, karena manusia memang mengklasifikasikan orang lain ke dalam kelompok orang sederajat, orang yang lebih rendah derajatnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers.1982). Hlm 145

<sup>7</sup> Aminuddin, Op.Cit, hlm. 7.

Dengan demikian, jumlah kelas sosial berbeda-beda dari daerah yang satu ke daerah lainnya. Jumlah strata sosial, yang memiliki anggota yang berstatus sama, juga bisa berbedamenurut penilaian peneliti. Bila misalnya, kita berbicara tentang kelas sosial menengah, maka kita tidak mengartikannya sebagai satu kelompok orang yang secara tegas dipisahkan dari kelas sosial lainnya oleh jarak status (status interval) yang tertentu; yang kita maksudkan ialah sekelompok orang, yang bergabung pada bagian tengah skala status, yang saling memandang dan bersikap antara satu sama lainnya sebagai anggota masyarakat yang setara.

Buruh tani adalah seseorang yang bekerja di bidang pertanian dengan cara melakukan pengelolaan tanah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk digunakan untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain.<sup>8</sup> Buruh tani disini adalah pekerja lahan yang mengurus mengelola pertanian dan yang memberi upahnya adalah petani, yang memiliki tanah



---

<sup>8</sup> <https://id.m.wikipedia.org>buruhtani.com>

**Gambar 1****Skema Konseptual Buruh Tani**